



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	:	19 (<i>sembilan belas</i>)
Tahun Sidang	:	2019-2020
Masa Persidangan	:	III
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Virtual Komisi VI DPR RI dengan PT Garuda Indonesia (Persero), PT ASDP (Persero), PT Pelni (Persero), dan PT KAI (Persero)
Hari, Tanggal	:	Rabu, 29 April 2020
Pukul	:	11.00 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Aria Bima, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	:	Pembahasan Kondisi Aktual terkait dampak Covid-19
Hadir	:	1. Dari 53 Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Irfan Setiাপুত্র; 3. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspawati; 4. Direktur Utama PT Pelni (Persero), Insan Purwarisya L. Tobing; 5. Direktur Utama PT KAI (Persero), Edi Sukmoro, beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Virtual Komisi VI DPR RI pada pukul 11.18 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Virtual Komisi VI DPR RI pada hari Rabu, 29 April 2020, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima
3. Sehubungan dengan wabah virus Covid 19, maka Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dilakukan secara virtual.

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VI DPR RI memahami bahwa sektor transportasi merupakan sektor yang terdampak sangat besar oleh Pandemi Covid-19 namun BUMN transportasi merupakan sarana vital pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan menjaga eksistensi negara kesatuan RI yang terdiri dari 17 ribu pulau. Oleh karena itu, Komisi VI DPR RI mendorong BUMN Transportasi untuk melakukan efisiensi operasional usaha, menjaga likuiditas dan memanfaatkan peluang penambahan *revenue* dalam rangka meminimalisasi dampak Pandemi Covid-19 terhadap kinerja perusahaan.
2. Komisi VI DPR RI meminta PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Pelni (Persero) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk membuat simulasi dan rencana mitigasi yang lebih mendetail mengenai dampak Covid-19 terhadap kinerja perusahaan transportasi baik skenario dampak ringan, menengah maupun berat dalam berbagai jangka waktu baik pendek, menengah maupun panjang.
3. Komisi VI DPR RI meminta PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Pelni (Persero) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk melaksanakan protokol kesehatan dalam mengoperasikan moda transportasi yang masih dijalankan, serta tetap mematuhi peraturan pembatasan transportasi dalam rangka Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan larangan mudik.
4. Komisi VI DPR RI mendorong PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Pelni (Persero) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk berpartisipasi aktif dalam penanggulangan Pandemi Covid-19 khususnya dalam hal distribusi barang penting dan barang pokok, obat, alat pelindung diri serta produk-produk farmasi dan kebijakan pemerintah lainnya yang dibutuhkan dalam penanggulangan Pandemi Covid-19.
5. Komisi VI DPR RI akan memberikan teguran atau sanksi melalui Kementerian BUMN kepada jajaran direksi BUMN Transportasi apabila terjadi kelalaian yang menyebabkan keterlambatan distribusi kebutuhan bahan pokok, obat dan alat kesehatan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ditugaskan pemerintah kepada BUMN Transportasi. Oleh karena itu, Komisi VI DPR RI mendorong BUMN Transportasi untuk menyusun *roadmap* distribusi bersama BUMN Klaster Pangan dan Farmasi, khususnya untuk daerah rawan pangan selama Pandemi Covid-19.
6. Komisi VI DPR RI mendukung PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Pelni (Persero) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk berkoordinasi dengan Kementerian BUMN untuk mengajukan relaksasi kredit (penundaan pembayaran angsuran dan keringanan pembayaran bunga) kepada kreditur dalam rangka mengurangi beban keuangan perusahaan di masa Pandemi Covid-19.

7. Komisi VI DPR RI meminta PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Pelni (Persero) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk menyusun daftar stimulus yang diperlukan dari pemerintah dalam rangka meminimalisasi dampak Pandemi Covid-19 terhadap kinerja BUMN Transportasi untuk disampaikan kepada kementerian/lembaga terkait pada rapat kerja selanjutnya.
8. Komisi VI DPR RI meminta PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Pelni (Persero) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk mengembalikan hak penumpang secara penuh sedapat mungkin melalui jasa perbankan, dengan tetap memperhatikan hak penumpang yang terdampak pembatalan tiket di tengah penerapan program pemerintah larangan mudik dampak Pandemi Covid-19.
9. Komisi VI DPR RI mendukung eksistensi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan meminta untuk menyusun dan mengimplementasikan strategi restrukturisasi usaha secara menyeluruh dan mendalam meliputi restrukturisasi operasional, kecukupan modal, model bisnis, dan pengaturan arus kas perusahaan untuk meminimalisasi dampak Covid-19 terhadap kinerja perusahaan termasuk dalam rangka *recovery* pasca Pandemi Covid-19.
10. Komisi VI DPR RI mendukung dan mengapresiasi kebijakan BUMN Transportasi untuk tidak melakukan PHK dan tetap memperhatikan hak-hak karyawannya sesuai dengan kondisi perusahaan.
11. Komisi VI DPR RI meminta PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Pelni (Persero) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (*sepuluh*) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 15.15 WIB.

Jakarta, 29 April 2020
PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,

TTD.

ARIA BIMA
A-189